

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA
GUNA MENINGKATKAN PENGHASILAN ASLI DESA
DI DESA DASAN GERIA KECAMATAN LINGSAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021**

**Ismi Arifiana Rahmandari¹, Sutardi², Rido Ashabul Kahfi³, Lalu Ahmad
Rahmad⁴ I Made Putra Suryantara⁵, MS Hambali⁶**
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram, Mataram,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6}
E-mail: sandijustitiaputra@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Potensi Wisata serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Potensi Wisata Dasan Geria, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan belum maksimalnya peran pemerintah Desa Dasan Geria sebagai animasi sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, fasilitasi kelompok, serta peran dalam pemanfaatan sumber daya dan keterampilan. Adapun beberapa faktor pendukung Peran Pemerintah Desa Dasan Geria dalam pengembangan potensi Wisata Dasan Geria adalah Dasan Geria kaya akan sumberdaya alam, Seni dan Budaya, akomodasi yang memadai, serta banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, sistem keamanan yang baik, adanya pengelolaan sampah yang baik namun masih terkonsentrasi dalam satu dusun sebagai pilot project, Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM yang masih tergolong rendah sehingga kurang solidnya organisasi atau kelompok-kelompok dimasyarakat, hubungan antar lembaga yang tidak begitu harmonis, infrastruktur sarana dan prasana yang masih belum memadai serta akses jalan yang masih membutuhkan pembenahan, system komunikasi yang belum begitu baik, dan beberapa hal lain yang perlu mendapat perhatian.

Kata Kunci: *Desa Wisata, Pemerintah Desa, Pengembangan, Peran*

ABSTRACT

The aim of this research is to identify the role of the Village Government in developing Tourism Potential as well as identifying supporting factors and inhibiting factors for the role of the Village Government in developing Dasan Geria Tourism Potential. This research uses descriptive qualitative methods. The research results show that the role of the Dasan Geria Village government has not been maximized as a social animation, mediation and negotiation, providing support, group facilitation, as well as a role in utilizing resources and skills. There

are several supporting factors for the role of the Dasan Geria Village Government in developing the tourism potential of Dasan Geria, namely that Dasan Geria is rich in natural resources, arts and culture, adequate accommodation, as well as a lot of tourism potential that can be developed, a good security system, good waste management, but is still concentrated in one hamlet as a pilot project, while the inhibiting factors are human resources which are still relatively low so there is a lack of solidity in organizations or groups in the community, relationships between institutions that are not very harmonious, infrastructure and facilities that are still inadequate and road access that still requires improvements, a communication system that is not very good, and several other things that need attention.

Keywords: *Tourism_Village, Village_Government, Development, Role*

PENDAHULUAN

Di dalam peraturan daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 41 tahun 2016 tentang desa wisata juga disebutkan bahwa desa dasan geria juga masuk menjadi salah satu desa yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata khususnya wisata alam (Faza, 2019).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Barat menggerakkan desa-desa yang memiliki potensi dan mempunyai keinginan untuk mengelola dan mengembangkannya menjadi desa wisata unggulan di Lombok Barat. Hal tersebut dilakukan untuk menggali potensi yang bisa dikembangkan sehingga dapat membantu pembangunan sektor ekonomi masyarakat yang terdapat pada Peraturan Daerah kabupaten Lombok Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 41 tahun 2016 tentang desa wisata (Mar'atus Sholihah, 2022).

Banyaknya potensi yang dimiliki Desa Dasan Geria dalam berbagai bidang, Berdasarkan Data Hasil Kajian dan Rencana Startegis

Pengembangan Desa Wisata Dasan Geria, terdapat beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa Dasan Geria seperti: wisata alam bukit Murpeji, view bendungan Meninting, agrowisata gula aren dan gaharu, air terjun dan perkebunan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta beberapa potensi yang lain. Maka dari potensi-potensi yang beranekaragam tersebut Pemerintah Desa Bersama elemen masyarakat setempat berencana menjadikan Desa Dasan Geria sebagai salah satu desa wisata unggulan baru di Kabupaten Lombok Barat. (Kajian dan Rencana Strategis Pengembangan Desa Wisata Dasan geria, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional terdapat pada pasal 29, yang berbunyi bahwa strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata. Pengembangan desa wisata tersebut secara tidak langsung akan melibatkan masyarakat Desa tersebut, dimana akan difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui pemberdayaan masyarakat

untuk pembangunan Desa sesuai dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2016 tentang Desa.

Pengembangan potensi desa oleh pemerintah desa, dalam hal ini potensi Pariwisata di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat masih kurang dalam proses implementasinya dikarenakan penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang masih sangat kurang serta belum solidnya hubungan antara pemerintah desa dengan kelembagaan desa dalam bekerjasama untuk mengembangkan potensi – potensi pariwisata yang sangat jelas terlihat adalah nihilnya pendapatan asli desa didalam lembar APBDES maupun laporan tahunan pemerintah desa, potensi desa yang belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara baik, jujur dan benar, hal ini terlihat masih banyak keluhan masyarakat terkait belum adanya pelatihan – pelatihan terhadap warga masyarakat terkait pengetahuan kepariwisataan untuk meningkatkan mutu SDM masyarakat, serta perbaikan jalan – jalan dusun sebagai akses utama pariwisata dan beberapa infrastruktur pendukung yang lain, begitu juga masih banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat terkait ketersediaan air bersih yang belum mampu diakses oleh semua warga masyarakat dan berbagai hal lain lagi yang menjadi pertanyaan masyarakat.

Dalam melakukan pengembangan potensi pariwisata desa pemerintah desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan agar setiap program pengembangan potensi pariwisata didesa mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, pemanfaatan hingga

pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi masyarakat maka pembangunan atau pengembangan potensi pariwisata akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat akan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan desa.

Peran Pemerintah Desa yang dimaksud disini seperti dalam hal Animasi Sosial, mediasi, pembangunan fasilitas, pemanfaatan sumber daya dan pemberi dukungan. Namun demikian, belum pernah ada pengkajian secara cermat mengenai Peran Pemerintah Desa Dasan Geria dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Dasan Geria.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “karakter, kapasitas, posisi dan tugas yang aktif berkontribusi di dalamnya” (SYARON BRIGETTE LANTAEDA, 2020). peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, jadi jika dikaitkan dengan peran sebuah instansi atau kantor maka dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dan dilakukan oleh instansi, sesuai dengan posisi dan kemampuan instansi atau kantor tersebut (Rosma, 2017). Sedangkan menurut Soekanto “peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran yang dapat dilakukan sebagai individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”. Peran adalah proses dinamis kedudukan (status) (Soekanto,

2005). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer, teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (Bauer, 2003). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception (Kahn, dkk., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu konsep karakter, kapasitas dan posisi yang aktif dalam menjalankan suatu tugas dalam organisasi tertentu. Sehingga, peran tersebut merupakan proses dinamis kedudukan (status) yang akan dinilai oleh para pengamat dan penilai. Dalam hal Pemerintah Desa yang merupakan organisasi dengan posisi sebagai alat Pemerintahan maka Peran Pemerintah Desa akan dinilai oleh masyarakat Desa itu sendiri.

Konsep Pemerintah Desa

Secara etimologis, kata desa berasal dari kata Sansekerta “deka” yang berarti rumah, kampung halaman, atau tempat lahir. Secara geografis, desa didefinisikan sebagai "kumpulan rumah dan bisnis pedesaan yang lebih kecil dari kota". Desa adalah kesatuan komunal sah yang terletak di dalam wilayah suatu kabupaten, diberi wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak leluhur dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah negara bagian. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan tersendiri berdasarkan hak asal usul yang khusus. Ide dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (HAW, 2003).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: Desa dan desa adat atau desa dengan nama lain (selanjutnya disebut desa) adalah kesatuan hukum komunal yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai hak untuk mengatur dan mengurusnya. Urusan pemerintahan yang mewakili kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak waris, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan lembaga pembina desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (Indah Dwi Qurbani, 2022)

Adapun pengertian Pemerintah Desa menurut Saparin adalah “simbol

formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan” (Saparin, 1979). Dalam menjalankan pemerintahan di suatu wilayah Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan sebagai daerah otonom. Widjaja, Haw menyatakan bahwa “otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan otonomi pemberian dari Pemerintah Pusat” (HAW, 2003). Pemahaman ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah desa mengetahui kebutuhan nyata masyarakatnya dan oleh karena itu desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan sumber dayanya secara mandiri. Kemandirian desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat atau mendayagunakan masyarakat juga dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

1. Animasi Sosial, animasi sosial merupakan kemampuan pelaku pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi antusiasme masyarakat, termasuk di dalamnya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.
2. Mediasi dan Negosiasi, Seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-

kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut.

3. Pemberi Dukungan, Salah satu peran dari pemberdaya masyarakat adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut.
4. Fasilitasi Kelompok, Pemerintah Desa memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan.
5. Pemanfaatan Sumber Daya dan Keterampilan, pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka.
6. Mengorganisasi, Peran pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat yang terkait dengan peran-peran fasilitatif adalah sebagai organisator. Keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan (Susanti, 2015).

Konsep Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu konsep yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk integrasi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang menekankan adat istiadat dan tradisi yang ada dan disajikan dalam suatu struktur masyarakat (Lia Afriza, 2020).

Ada dua aspek utama yang ditekankan ketika mendefinisikan konsep desa wisata. Sedangkan pada desa wisata, penekanannya diberikan pada fasilitas akomodasi sebagai tempat tinggal warga atau satuan yang ditentukan berdasarkan tempat tinggalnya. Di sisi lain, desa wisata fokus pada daya tarik, yang dalam hal ini mungkin terkait dengan aktivitas sehari-hari warga lokal yang dapat berinteraksi dengan wisatawan, seperti menenun tekstil tradisional yang terkait dengan desa Sade.

Secara lebih spesifik, desa wisata diartikan sebagai suatu kawasan di mana sejumlah kecil wisatawan dapat tinggal dan merasakan suasana tradisional serta belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Konsep desa wisata muncul ketika terjadi “kejenuhan” di sektor pariwisata, apalagi pariwisata hanya terfokus pada kehadirannya di perkotaan.

Pada tataran analisis lain, kemunculan konsep desa wisata berbarengan dengan munculnya beberapa istilah seperti pembangunan pariwisata berkelanjutan, wisata desa, dan ekowisata (Sastrayuda, 2010). Semua istilah ini menekankan keberlanjutan dan partisipasi dalam semua inisiatif menuju pengembangan sektor pariwisata. Kedua faktor ini erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat desa. Secara umum kehidupan desa dan masyarakat pedesaan dibangun atas dasar keberlanjutan, yang diwujudkan dalam peraturan semua negara yang mengatur bahwa segala sesuatu harus dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Apalagi segala sesuatu yang dilakukan masyarakat desa selalu dilandasi oleh

partisipasi setiap anggota masyarakat. Artinya masyarakat desa selalu berperan aktif dalam segala pengambilan keputusan dan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan desa. Tidak semua desa bisa disebut desa wisata, diperlukan persyaratan tertentu. Kondisi tersebut dikategorikan ke dalam lima kriteria. (Sudana, 2013):

1. Tempat Wisata: Dari tempat wisata yang ada di desa ini telah dipilih yang paling menarik, baik tempat wisata alam maupun hasil karya manusia, termasuk budaya.
2. Jarak tempuh : Kemudahan akses merupakan kriteria yang dapat menjelaskan apakah suatu desa dapat disebut sebagai desa wisata atau tidak. Jarak tersebut berkaitan dengan mudah tidaknya desa tersebut dijangkau oleh wisatawan baik dari ibu kota negara maupun ibu kota kabupaten/kota.
3. Luas desa: Kriteria ini mengacu pada daya dukung wisata suatu desa berdasarkan jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik desa dan luas wilayah.
4. Kepercayaan dan sistem kemasyarakatan: Kriteria ini sangat penting mengingat banyaknya peraturan yang menjadi milik masing-masing desa dan mengikat masyarakat desa secara keseluruhan. Lebih lanjut, peraturan ini juga diperkuat dengan adanya mayoritas agama di kalangan masyarakat desa. Sekalipun ditetapkan sebagai desa wisata dan wisatawan dapat dengan mudah memasuki desa tersebut, namun kedua hal tersebut harus tetap diperhatikan agar wisatawan dapat menikmati desa

tersebut tanpa merusak kehidupan masyarakat di desa tersebut.

5. Ketersediaan infrastruktur: Indikator ini mengacu pada fasilitas yang diterima wisatawan, mulai dari pelayanan transportasi, listrik, air, sanitasi, telepon, dan fasilitas lain yang menunjang kegiatan pariwisata. Jika suatu desa wisata memenuhi syarat tersebut, maka akan membantu Anda memutuskan apakah akan melakukan perjalanan sehari atau menginap.

Secara umum, desa wisata setidaknya dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk berdasarkan sebarannya di Indonesia. Bentuk ini juga didasarkan pada pola, proses dan jenis pengelolaan yang dikembangkan di desa.

- a. Desa Wisata Terstruktur (Enklave), Meski lahan terbatas, namun merupakan desa wisata dengan infrastruktur lengkap. Karena kelebihan tersebut, desa wisata ini dikenal tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Selain itu, terbatasnya lahan yang tersedia juga memungkinkan adanya rencana yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk menarik investor eksternal untuk membangun infrastruktur pendukung di sekitar desa wisata. Keunggulan lain dari bentuk desa wisata terstruktur adalah lokasinya yang biasanya jauh dari masyarakat sekitar sehingga meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.
- b. Desa Wisata Terbuka (Spontan) merupakan desa wisata yang mempunyai ciri struktur tata ruang dan struktur serta integrasi yang tinggi dengan masyarakat setempat. Setiap masyarakat di desa

merasakan adanya bagian pendapatan dari sektor pariwisata. Sebagai perbandingan, morfologi setidaknya dua desa wisata ini juga memiliki kemiripan dengan desa wisata Sade.

Selain memiliki ciri desa wisata terstruktur, Desa Sade juga memiliki ciri desa wisata terbuka. Misalnya saja desa wisata Sade yang memiliki luas terbatas namun memiliki infrastruktur yang cukup sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Hal ini membuat Dusun Sade menjadi terkenal tidak hanya di kalangan wisatawan dalam negeri, namun juga menarik perhatian wisatawan mancanegara. Salah satu ciri desa wisata terbuka adalah menyediakan pariwisata melalui kontak langsung dengan kehidupan masyarakat setempat. Penduduknya juga bergantung pada wisatawan, atau hampir bergantung pada mereka. Artinya, Dusun Sade cukup unik karena merupakan desa wisata terstruktur dan terbuka.

Konsep Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “pengembangan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu menjadi lebih baik, maju, sempurna dan berguna”. Pengembangan merupakan suatu proses atau aktivitas untuk memajukan sesuatu yang dianggap perlu melalui peremajaan atau memelihara yang sudah berkembang agar menjadi lebih menarik dan berkembang (Kanom, 2021). “Pengembangan ialah suatu upaya dalam memperbaiki daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi dan sudah melalui proses perencanaan yang matang, sehingga nantinya dalam

pembangunan tidak terjadi hambatan” (Marpaung, 2002)

METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang mengambil tempat atau lokasi di Desa Dasan Geria Kecamatan Lingsar kabupaten Lombok Barat, Sumber data dalam hal ini, data Primer dan data Skunder, Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi, wawancara langsung dilakukan dengan Kepala Desa, BPD dan beberapa Lembaga desa yang lain serta beberapa tokoh masyarakat sedangkan data skunder atau data pendukung lainnya didapat dari dokumen seperti RPJMDES dan APBDES tahun 2021 dan beberapa dokumen pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi Wisata Desa Dasan Geria

Dari hasil wawancara dan melihat dokumen hasil kajian potensi wisata yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dasan geria, didapat beberapa potensi wisata yang bisa dikembangkan oleh pemerintah desa dasan geria antara lain :

1. Desa Sehat, dengan obyek wisata Pengolahan Sampah dengan Teknik 4R, Homestay Pondok wisata dan rumah wisata, Pengelolaan air bersih dan sanitasi
2. Wisata Bukit Murpeji dengan obyek wisata, Panorama Bendungan Meninting dan Kuliner, tiga air terjun, camping ground, taman bunga sepeda layang (*sky-bikecycle*) dan kereta gantung.
3. Wisata Seni Budaya dan Religi berbasis islami dengan obyek

wisata seperti rudat, sikir zaman, baca hikayat, pawai takbiran; atraksi seni budaya pada acara HUT Dasan Geria seperti presean, tembang Sasak, opera sejarah Dasan Geria.

4. Wisata Air dengan obyek wisata, olah raga air, renang dan Water Park
5. Wisata Sawah dengan obyek wisata pertanian tradisional, bungalow sawah (*repuq* dan *bebaléq*) dan atraksi proses budidaya padi secara tradisional “ngampar-nenggale begau-lowong- ngome nyisip-matak dan ngerampék-nyekel padé.
6. Usaha Mikro Kecil dan Pusat Oleh-oleh dengan obyek wisata seperti proses produksi makanan yaitu kuliner tradisional, gula aren, kuliner kue tradisional dan olahan aneka buah; dan kerajinan tangan berbahan ijuk dan pande besi.

Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Dasan Geria

Peran Pemerintah Desa Dasan Geria dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata Dasan Geria dapat diukur dengan teori Ife dan tesoriro 2005 yakni dari beberapa poin yaitu, peran dalam animasi sosial, peran dalam mediasi dan negosiasi, peran dalam pemberi dukungan, peran dalam fasilitasi kelompok, peran dalam pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan, peran dalam mengorganisasi.

a. Peran dalam Animasi Sosial

Animasi sosial merupakan kemampuan pelaku pemberdaya masyarakat untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat, termasuk di dalamnya mengaktifkan, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi warga untuk

bertindak (Ife dan Tesoriero, 2005 dalam Susanti, 2015: 898-912). Bila dilihat dari teori yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa peran Pemerintah Desa Dasan Geria sebagai animasi sosial adalah dengan cara memberikan wadah kepada sekelompok pemuda berupa pembentukan Pokdarwis Geria Bersahabat Tahun 2020. Pokdarwis inilah yang harapannya nantinya menjadi cikal bakal berdirinya Desa Wisata Dasan Geria.

Berdirinya POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang merupakan sekelompok pemuda karang taruna ini juga dibantu oleh Pemerintah Desa untuk menggali potensi mereka, terutama dalam memberikan inspirasi agar mereka dapat bergerak untuk dapat mengembangkan Desa. Namun Organisasi pemuda hanya dipandang sebelah mata oleh beberapa masyarakat karena ketidakjelasan visi dan kinerja mereka ditambah lagi dengan arah kebijakan yang selalu berubah-ubah sehingga dukungan terhadap POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) pun semakin berkurang secara anggaran.

“ Dahulu kami sangat semangat mas dalam menggagas potensi wisata didesa kami sehingga ada beberapa spot foto yang sudah kami bangun namun karena pengelolaan yang belum benar dan dukungan anggaran dari desa yang semakin berkurang sehingga menyurutkan semangat kami. Makanya sekarang jadi nggak jelas. Bahkan banyak anggota yang sudah tidak aktif lagi”.

Dukungan anggaran Rp.30.000.000 untuk operasional Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) belum sempat terealisasi karena Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan

republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan keuangan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, direktort jendral pembangunan desa dan prdesaan Nomor 8/PK/2021 dan nomor 02/PDP/2021 menginstruksikan untuk menambah anggaran BLT Dana desa dengan nominal desa penerima DD diatas Rp.1.200.000.000 (Satu miliar dua ratus juta) harus menganggarkan 35% dari DD untuk BLT, sehingga anggaran Pokdarwis sebesar Rp.30.000.000 dialihkan ke BLT, hal ini yang membuat ketua dan anggota Pokdarwis sedikit kecewa dengan pemerintah desa, ketua pokdarwis berharap pemerintah desa mengambil anggaran dari program yang lain bukan kemudian dari anggaran pokdarwis, hal ini berdampak besar di pokdarwis.

Jika ditinjau dari program tersebut, Pemerintah Desa telah berupaya mendorong pemuda untuk menjadi lebih unggul dan kreatif dalam pengembangan potensi desa wisata namun kemudian tidak ditindak lanjuti dengan dukungan secara berkelanjutan seperti dukungan anggaran.

b. Peran Dalam Mediasi dan Negosiasi

Seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut (Susanti, 2015).

Pada tahun 2017, bersama dengan penetapan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Dasan Geria dirumuskan dan ditetapkan juga visi Desa Dasan Geria sebagai berikut : Menuju Masyarakat Desa Dasan Geria yang SOLAH”. Visi

tersebut dilakukan dengan melalui misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya
- 2) Mewujudkan pemerintah bersih dan berwibawa (tata kelola pemerintahan yang baik, (ex: pendataan aset desa beserta pemanfaatannya), berkeadilan, dan demokratis (ex: rembug desa, sebagai landasan musyawarah mufakat)
- 3) Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan damai
- 4) Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, terutama memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi potensi kaum muda di dalam berperan aktif.
- 5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berbasis sektor pertanian, peternakan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
- 6) Peningkatan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana)
- 7) Peningkatan peran perempuan dalam pembanguna desa.
- 8) Peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini, beberapa program yang dirancang oleh Pemerintah Desa pada RPJM 2017-2023, terutama untuk menjalankan misi no 2, adalah dengan menyelenggarakan rembug desa setahun sekali. Bila ditinjau dari program Pemerintah Desa dalam menjalankan rembug desa, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa kurang berperan dalam mediasi dan negosiasi di masyarakat. Hal tersebut terlihat juga pada saat launching potensi-potensi wisata desa wisata,

tingkat kehadiran masih sangat rendah, petikan wawancara bersama Bapak Anhar selaku Kepala Dusun Dasan Geria Utara mengatakan bahwa Bapak Kepala Desa dan perangkatnya harusnya secara intens melakukan mediasi dan negosiasi kepada masyarakat Desa dengan cara mensosialisasikan rencana mengenai pengembangan potensi wisata Desa Dasan Geria. Hal ini harus di lakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep pengembangan potensi Desa Wisata kepada masyarakat. Berikut petikan wawancaranya,

“Konflik pada saat penyusunan rancangan Desa Wisata sering terjadi, awalnya tokoh agama dan tokoh masyarakat tidak setuju karena pola pikir masyarakat tentang wisata adalah seperti senggigi dan lainnya., Pak Kepala Desa juga jarang melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang Desa Wisata. Harusnya Masyarakat dikumpulkan di tiap RT nya agar bisa mendengar sosilisasi serta juga dilakukan penggalian potensi Desa”.

Sekretaris BPD Desa Dasan Geria Bapak Suhaili memberikan Keterangan kepada saya selaku peneliti beliau menyampaikan :

“Di desa kami sering sekali terjadi konflik dimasyarakat terkait selisih paham mengenai Desa Dasan Geria yang akan dibawa menjadi desa wisata atau konflik-konflik isu agama dan konflik sosial lainnya, hanya saja kami melihat tidak ada kesigapan dari pemerintah desa terutama bapak kepala desa untuk menyelesaikan konflik tersebut, kami ingin ketika kemudian ada masalah atau konflik yang muncul dimasyarakat, pemerintha desa dalam hal ini kepala desa sigap untuk segera

turun menyelesaikan masalah dimasyarakat, sudah terlalu sering kami selaku BPD yang mengambil alih peran pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik-konflik dimasyarakat” terangnya.

c. Peran Sebagai Pemberi Dukungan

Salah satu peran dari pemberdaya masyarakat adalah untuk menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut (Susanti, 2015).

Bila dilihat lebih lanjut, Pemerintah desa memberikan dukungan kepada Pokdarwis berupa pembentukan lembaga Desa Wisata yang kemudian disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Dasan Geria sebagai salah satu sarana dalam melaksanakan perannya sebagai pemberi dukungan. Dalam hal ini, Pemerintah desa sebagai penasihat Lembaga Desa Wisata Pokdarwis Geria Bersahabat melalui surat keputusan (SK) kepala Desa Dasan Geria, namun pemerintah desa belum sepenuhnya mampu memberikan dukungan penuh kepada POKdarwis, pemerintah desa hanya membentuk dan membangun sekretariat Pokdarwis tidak kemudian memberikan dukungan baik itu anggaran maupun peningkatan kapasitas sehingga pokdarwis terkesan tidak aktif.

d. Fasilitasi Kelompok

Pemerintah Desa memberikan fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan (Susanti, 2015). Sesuai dengan data di atas, Pemerintah Desa melalui APBDes memberikan dana pengembangan potensi Desa Wisata untuk mengembangkan wisata melalui program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021. Komitmen

Pemerintah Desa dalam melakukan kajian potensi wisata Wisata terbukti dengan adanya anggaran Dana Desa untuk program pengkajian dan perencanaan strategis desa wisata dasan geri.

Dukungan dari Pemerintah Desa juga tidak hanya berupa pembentukan secara sah Desa Wisata, tetapi juga dalam pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata yang terlihat dari RKP 2021 dan RPJM 2017-2023. Program pembangunan Desa yang memfokuskan untuk Pembangunan infrastruktur seperti pembanungan sarana dan prsarana penunjang pariwisata seperti pembangunan drainase tahun 2021 dan, pembangunan serta pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa. Komitmen Pemerintah Desa untuk selalu memberikan prioritas pada program peningkatan perekonomian warga melalui pengembangan potensi Desa Wisata

e. Peran Dalam Pemanfaatan Sumber Daya dan Keterampilan

Pemerintah sebagai pemberdaya masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas maupun kelompok. Berbagai kelompok warga ini harus mendapat perhatian dari pemerintah sehingga dalam pengembangannya mereka bisa mengoptimalkan keterampilan mereka (Susanti, 2015).

Dalam hal ini, Pemerintah Desa Dasan Geria belum terlihat memberikan dukungan nyata terhadap kelompok – kelompok Masyarakat baik itu kelompok pemuda maupun Pokdarwis itu sendiri dalam bentuk bantuan modal usaha untuk kelompok UMKM serta pelatihan pelatihan kepariwisataan dan

sejenisnya, hal ini terbukti dengan belum adanya data didesa terkait dengan data kelompok masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Satria Mula Jati Selaku Sekdes desa Dasan Geria . Desa menyebutkan bahwa “Pelatihan-pelatihan khusus terhadap kelompok masyarakat terkait kepariwisataan ataupun keahlian yang lain memang belum pernah dilakukan oleh pemerintah desa begitu juga bantuan modal usaha untuk UMKM memang belum bisa kami laksanakan ditahun 2021 karena banyak sekali refocusing anggaran seperti untuk keperluan PPKM dan untuk bantuan social seperti BLT”.

f. Peran Dalam Mengorganisasi

Peran pelaku perubahan sebagai pemberdaya masyarakat yang terkait dengan peran-peran fasilitatif adalah sebagai organisator. Keterampilan mengorganisasi melibatkan kemampuan pelaku perubahan untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. (Susanti, 2015).

Peran Pemerintah Desa Dasan Geria sebagai organisator dilihat dari ditetapkannya POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Geria Bersahabat sebagai lembaga yang menjadi Garda terdepan dalam merintis Desa Wisata dimana Pemerintah Desa sebagai penasihat Pokdarwis melalui surat keputusan (SK) kepala Desa Dasan Geria:

Melalui RPJM 2017-2023 diketahui pula adanya program untuk meningkatkan kreatifitas pemuda dengan jalan memperkuat keorganisasian karang taruna serta memberikan kesempatan bagi pemuda untuk ikut serta dalam kegiatan Desa. Secara tidak langsung, pemuda telah dbentuk untuk mengetahui tata cara

pembuatan dan pengelolaan organisasi ketika ikut serta dalam kegiatan Desa. Pelan tapi pasti, Pemerintah Desa mendorong pemuda untuk dapat membuat organisasi kepemudaan yang lebih terstruktur lagi. Pembelajaran secara langsung ini terbukti lebih efektif daripada hanya diberikan pelatihan mengenai pembentukan organisasi. Dengan pelibatan secara langsung, pemuda dapat belajar mengatasi masalah yang ada dan mengkoordinasikan anggota sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya. Hal itu sesuai dengan cara belajar berbasis “Problem Based Learning” yang diajarkan kepada mahasiswa selama ini.

Dalam hal ini Pemerintah Desa belum mampu membawa POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Geria Bersahabat yang sudah dibentuk oleh pemerintah desa untuk menjalankan perannya sebagai pengelola Desa Wisata secara resmi ditingkat desa. Pemerintah desa juga belum mampu membangun hubungan yang harmonis antar lembaga desa terbukti dari hasil wawancara dari sekertaris BPD mengatakan antara BPD dan pemerintah desa masih belum satu bahasa karena kurangnya koordinasi dan komunikasi diantara keduanya.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengembangan Sektor Wisata

Faktor Pendukung dan penghambat pasti ditemukan dalam mengembangkan sebuah Desa menjadi Desa Wisata. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Pengembangan Sektor Wisata

a. Pengelolaan Sampah

Pariwisata identik dengan keindahan dan kebersihan yang mencerminkan kebudayaan suatu Bangsa. Permasalahan sampah adalah salah satu momok penting dalam pengelolaan Desa Wisata. Semakin tingginya angka pengunjung maka semakin tinggi pula kemungkinan adanya peningkatan sampah di daerah tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat yang belum sadar dengan adanya pengelolaan sampah. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya warga yang tidak peduli akan lingkungan, sementara program pengelolaan sampah menjadi sangat penting dalam pengembangan desa wisata.

Pemerintah Desa Dasan Geria telah mengalokasikan APBDes untuk program pengelolaan sampah sebesar 15.000.000 atau Selain itu, pada tahun 2021, dilaksanakan juga studi banding ke TPST Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan studi untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah rumah tangga, industri rumah tangga serta juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Program ini menjadi salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam pengembangan Potensi Desa Wisata, terutama yang berbasis pada wisata alam. Dengan adanya pengelolaan sampah yang baik, maka lingkungan alam desa akan tetap terjaga dan potensi wisata yang ditawarkan oleh Desa Wisata Dasan Geria tidak akan punah.

b. Akomodasi

Akomodasi berupa hotel atau vila merupakan peran penting dalam pengembangan desa wisata. Adanya

hotel atau vila menjadi salah satu akomodasi umum yang sangat membantu para wisatawan saat berkunjung. Hotel merupakan sarana pokok kepariwisataan (main tourism superstructures) yang berarti hidup dan kehidupannya banyak bergantung pada jumlah wisatawan yang datang. Bila diumpamakan bahwa industri pariwisata adalah suatu bangunan, maka sektor perhotelan merupakan tiangnya (Arthur Anderson Samalam, 2016).

Hotel adalah salah satu unsur yang mendukung terselenggaranya pariwisata. Menurut Spillane ada 3 pemain utama dalam industri pariwisata (Spillane, 2001):

1. Mereka yang mencari kepuasan atau kesejahteraan lewat perjalanan mereka (wisatawan atau tamu).
2. Mereka yang tinggal dan berdomisili dalam masyarakat yang menjadi alat pariwisata (tuan rumah atau penduduk setempat).
3. Mereka yang mempromosikan dan menjadi perantaranya (bisnis pariwisata atau perantara).

c. Sistem Keamanan

Sistem keamanan yang baik harus di terapkan dalam setiap daerah wisata. Dengan adanya sistem keamanan yang memadai dan terpercaya, pengunjung akan dengan senang hati untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut.

Sistem keamanan itu sendiri juga seharusnya selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa naiknya jumlah wisatawan juga akan memacu jumlah kriminalitas yang ada di kawasan tersebut. Oleh sebab itu, peningkatan keamanan wajib untuk selalu di-up grade setiap saat.

Peningkatan sistem keamanan di Desa Dasan Geria dilakukan dengan program peningkatan kualitas keamanan yang di anggarkan pada APBDes 2020 sebesar Rp 14.678.000 (table dan pada tahun 2021 sebesar Rp 25.050.000,00 (tabel 7). Hal ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Desa Dasan Geria dalam mengembangkan Potensi Desa Wisata Dasan Geria agar tetap aman dan damai.

2. Faktor Penghambat

Pengembangan Sektor Wisata

a. Rendahnya SDM

Rendahnya SDM akan menyulitkan Pemerintah Desa dalam mengembangkan suatu Potensi wisata. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana tata kelola dari daerah wisata tersebut. Tata kelola yang semrawut karena rendahnya SDM dapat memicu konflik internal dalam masyarakat Desa.

Selain itu, rendahnya SDM juga akan menyulitkan komunikasi dengan wisatawan. Sebagai contoh, salah satu tata cara komunikasi dengan wisatawan dalam menawarkan suatu daerah wisata adalah melalui media internet. Akan sangat menyulitkan apabila tidak ada SDM yng memadai yang dapat menjalankan komunikasi tersebut. hal itu tentu saja akan berhubungan dengan menurunnya wisatawan yang berkunjung. Apabila hal ini terus berlangsung, tentu saja daerah wisata itu akan mati dengan sendirinya.

SDM di wilayah Desa Dasan Geria masih tergolong rendah dimana 65% masyarakat desa berprofesi sebagai petani dan pekebun. Dari data yang kami peroleh, masih sedikit yang mengenyam pendidikan tinggi (D1,D2,D3,S1), yaitu sekitar 11 orang. Sedangkan kebanyakan hanya

mengenyam bangku SD (1.294 orang). Perlu adanya peningkatan SDM di daerah ini sehingga tata kelola serta promosi dari Desa Wisata akan bisa untuk dikembangkan.

b. Motivasi yang Rendah

Jika dilihat dari data yang ada, masih banyak jumlah angkatan kerja usia 15-60 tahun yang tidak menentu pekerjaannya, yaitu sekitar 286 jiwa (Pemerintah Desa dan Tim, 2019). Hal tersebut memperlihatkan bahwa motivasi massyarakat untuk berkembang ke taraf hidup lebih baik masih rendah. Secara tidak langsung, hal tersebut akan mempengaruhi pengembangan desa wisata.

Pengembangan Desa Wisata tidak pernah luput dari peran serta masyarakat desa yang berdomisili di daerah tersebut. apabila masyarakat di daerah tersebut tidak memiliki motivasi yang tinggi dalam mengembangkan taraf hidupnya menjadi lebih baik, apalagi jika diminta untuk mengembangkan desa wisata itu sendiri. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat yang vital dalam pengembangan Desa Wisata Dasan Geria

c. Hubungan Pemerintah Desa dan Lembaga belum Solid

Hubungan antara pemerintah dengan lembaga juga besar pengaruhnya terhadap pengembangan potensi wisata ini, hubungan lembaga dengan pemerintah desa yang kurang harmonis sehingga menimbulkan kurangnya dukungan dari lembaga yang mengakibatkan banyak program program pemerintah desa terkait dengan pengembangan potensi wisata menjadi tidak terealisasi karena kurangnya koordinasi serta komunikasi dengan lembaga seperti BPD, LPM dan lembaga yang lain,

4) Sistem Komunikasi

sistem komunikasi yang baik akan dapat memajukan pariwisata di suatu tempat wisata. Sebagai contoh, dengan adanya profil desa dari Desa Wisata itu sendiri akan membuat adanya komunikasi secara tidak langsung antara wisatawan dan desa wisata. Dalam hal ini, wisatawan akan dapat dengan mudah memeriksa potensi, fasilitas dan akomodasi yang ditawarkan oleh daerah wisata dan juga budget untuk berwisata di daerah tersebut. secara tidak langsung, sistem komunikasi menjadi vital dalam pengelolaan desa wisata. Profil dan website desa dasan geria yang belum tersedia dan mudah untuk diakses perlu menjadi perhatian penting untuk kemajuan pengembangan potensi wisata

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut yaitu:

1. Peran Pemerintah Desa Dasan Geria dalam pengembangan Potensi Desa Wisata Dasan Geria bisa kita lihat dalam konsep (Ife dan Tesoriero, 2005 dalam Susanti 2015) Peran Pemerintah dalam pengembangan potensi wisata, dari 6 Konsep (Ife dan Tesoriero, 2005 dalam Susanti 2015) yakni peran sebagai Animasi Sosial, Mediasi dan Negosiasi, Pemberi dukungan, Fasilitas Kelompok, Pemanfaatan SDM dan Keterampilan serta peran mengorganisasi, secara keseluruhan peran yang paling terlihat secara signifikan adalah dalam peran Animasi Sosial dan fasilitasi Kelompok, sedangkan 4 peran lainnya masih belum berjalan dengan baik.
2. Faktor – factor yang mempengaruhi peran pemerintah desa Dasan Geria dalam pengembangan Potensi wisata antara lain :
 - a) Faktor pendukung Pengembangan Sektor Wisata Dasan Geria kaya akan sumberdaya alam akomodasi yang memadai, serta banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan dan sudah direncanakan secara strategis, sistem keamanan yang baik, adanya pengelolaan sampah yang baik namun masih terkonsentrasi dalam satu dusun sebagai pilot project, tinggal bagaimana desa merealisasikan ke semua dusun,.
 - b) Faktor penghambat Pengembangan Sektor Wisata SDM yang masih tergolong rendah sehingga kurang solidnya organisasi atau kelompok-kelompok dimasyarakat, hubungan antar lembaga yang tidak begitu harmonis, infrastruktur sarana dan prasana yang masih belum memadai serta akses jalan yang masih membutuhkan pembenahan, system komunikasi yang belum begitu baik, tidak aktifnya pengurus BUMDES sebagai badan yang menaungi Pokdarwis, motivasi penduduk yang masih rendah dan regulasi pusat serta daerah yang sering berubah yang mengakibatkan seringnya refocusing anggaran ditengah jalan yang berdampak pada tidak terealisasinya apa yang memang sudah direncanakan

didalam APBDES hasil
Musrebangdes

Harian Regional JUMPA 1 [2],
25 - 42.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur Anderson Samalam, D. O. (2016). PERANAN SEKTOR AKOMODASI DALAM UPAYA MEMPROMOSIKAN OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA. *Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata Volume 3, Nomor 1*, 1 - 13.
- Bauer, J. C. (2003). Role Ambiguity and Role Clarity : A Comparison of Attitudes in Germany and the United States. 55-56.
- Faza, M. A. (2019). Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Indonesia (Vol. 19(1))*, 10-29.
- HAW, W. (2003). *Otonomi Desa (Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh)*. Jakarta: PT.Rja Grafindo Persada.
- Indah Dwi Qurbani, M. L. (2022). ANALISIS NORMATIF PENGATURAN PEMBENTUKAN DESA ADAT. *GRONDWET; Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Admiistrasi Negara Vol. 01 No. 02*, 92 - 106.
- Kanom. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN KUTA LOMBOK SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN. *Jurnal*
- Lia Afriza, H. D. (2020). PENGELOLAAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Sains Terapan Pariwisata, Vol. 5 No. 3*, 306-315.
- Mar'atus Sholihah, S. A. (2022). The Role of Village Government in the Development of Tourism Villages in Tempos Village West Lombok Regency Indonesia. *Jurnal Pariwisata Nusantara (JUWITA), Volume 1, No. 3*, 256 - 263.
- Marpaung. (2002). *Pengantar Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Rosma. (2017). FUNGSI KEPEMIMPINAN DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR. *Jurnal Administrative Reform, Vol 5, No. 3*, 139-147.
- Saparin, S. (1979). *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastrayuda, G. S. (2010). *Hand out mata kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Spillane, J. (2001). *Ekonomi Pariwisata ; Sejarah dan Prospeknya*. Jakarta: Kanisius.
- Sudana, I. P. (2013). Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis. *Analisis Pariwisata Vol. 13 No. 1*, 11.
- Susanti, S. (2015). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang. *eJurnal Ilmu Administrasi Negara*. 2015, 3 (3), 898-912.
- SYARON BRIGETTE LANTAEDA, F. D. (2020). PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RPJMD KOTA TOMOHON. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, VOLUME 04 NO. 048*.